

**KONSEKUENSI INFORMASI ASIMETRIS DALAM PERKREDITAN DAN  
PENANGANANNYA PADA LEMBAGA PERBANKAN**  
*Consequences of Credit Asymmetric Information and It's Treatment in Banking Institutions*

**Taswan**

Program Studi Manajemen Universitas Stikubank  
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang 50233  
([taswanda@yahoo.com](mailto:taswanda@yahoo.com))

**ABSTRAK**

Informasi asimetris sangat potensial terjadi pada bisnis perkreditan. Debitur adalah agen dari kreditur. Sebagai agen perlu menjalankan amanah pihak principal (kreditur) berdasarkan kontrak kredit yang disepakati antara kreditur dengan debitur. Namun bila kreditur menghadapi informasi asimetris yang tinggi, maka tidak bisa mendesain kontrak kredit secara fair. Konsekuensinya konflik keagenan antara kreditur dengan debitur bisa terjadi, harga kredit menjadi mahal, risiko kredit menjadi tinggi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut perlu dikelola misalnya melalui sistem monitoring yang efektif, *loan covenant*, pengetatan regulasi BMPK, *Credit Rationing*, penjaminan dan asuransi kredit serta restrukturisasi kredit.

**Kata Kunci:** informasi asimetris, keagenan, *loan covenant*, *credit rationing*, restrukturisasi kredit.

**ABSTRACT**

*Asymmetric information is potentially occur in the credit business. Debtor is the agent of the creditor. As an agent needs to carry out the mandate the principal (lender) based on the credit contract agreed between the creditor with the debtor. But when lenders face high information asymmetry, then it can not design a fair credit contract. Consequently agency conflicts between creditors with the debtor could occur, the price of credit to be expensive, a high credit risk. Consequences needs to be managed for example through an effective monitoring system, loan covenant, tightening regulation of Legal Lending Limit, Credit Rationing, guarantees and credit insurance and debt restructuring.*

**Key word:** *asymmetric information, agency, covenant loan, credit rationing, debt restructuring.*

---

## PENDAHULUAN

Bisnis perbankan di Indonesia masih didominasi oleh bisnis perkreditan. Sebagian besar pendapatan bank berasal dari bisnis perkreditan, meskipun tidak menutup mata bahwa pada akhir-akhir ini *fee base income* semakin meningkat akibat penjualan produk dan jasa perbankan lainnya. Disamping itu, dengan menempatkan kredit (menyalurkan dana) dan menerima kembali angsuran pokok dan bunga maka sangat membantu pengelolaan likuiditas bank, bahkan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya juga tidak lepas dari sumber-sumber dana dari pelunasan kredit. Aktivitas perkreditan yang tepat juga bisa meningkatkan rentabilitas bank. Semakin besar portofolio kredit semakin besar kemampuan bank dalam memperoleh penghasilan. Namun demikian pemberian kredit tidak hanya untuk kepentingan bank, pihak debitur juga sangat terbantu terutama bagi yang akan mengembangkan bisnisnya atau untuk memelihara keberlanjutan bisnisnya. Bersama bank, melalui perkreditan bisa berbagi risiko, tidak hanya berbagi pendapatan. Bisnis adalah berbagai risiko dan berbagi keuntungan. Lebih jauh, bila perkreditan dilakukan oleh banyak lembaga perbankan dan oleh banyak debitur, maka kredit akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan manfaat kredit akan tercapai apabila pemberian kredit itu aman, terarah dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah dalam arti penggunaan kredit mesti sesuai dengan perencanaan kredit atau kesepakatan (perjanjian) kredit. Sasaran kredit itu menghasilkan berarti pemberian kredit memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, debitur dan publik. Pemberian kredit yang tidak aman, tidak terarah (tidak sesuai perjanjian, misal terjadi *side streaming*) atau bahkan tidak bisa memberikan kontribusi pendapatan, maka kredit tersebut bermasalah. Kredit bermasalah atau kegagalan kredit pada gilirannya bisa menguras modal bank. Penurunan modal bank akibat kerugian kredit

pada gilirannya dapat menimbulkan kebangkrutan bank.

Persoalannya adalah pada tujuan, manfaat dan sasaran kredit itu bisa tepat tercapai kalau sejak awal bank mendapatkan informasi yang *fair* mengenai segala sesuatu tentang bisnis debitur dan tentang debitur. Tanpa mendapatkan informasi yang *fair*, bank akan kesulitan untuk mendesain kontrak kredit yang *fair*, yang bisa memenuhi pencapaian tujuan, manfaat dan sasaran tersebut. Bagaimana potensi terjadinya asimetri informasi dalam perkreditan? Debitur sangat mungkin melakukannya demi mendapatkan kucuran kredit dari bank. Tulisan ini akan menjelaskan informasi asimetris dalam perkreditan, apa konsekuensinya dan bagaimana menanganinya. Teori keagenan hutang menjadi mayor pembahasan ini dan berbagai pendekatan disajikan untuk menangani konsekuensi informasi asimetris terhadap risiko kredit, baik yang belum terjadi ataupun bila risiko kredit benar-benar terjadi. Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan kontribusi dalam memahami pengelolaan risiko kredit yang berbasis pada informasi asimetris.

## PEMBAHASAN

Analisis kredit adalah tugas yang sangat menentukan profil risiko kredit di masa depan suatu bank. Kesalahan dalam analisis kredit akan berakibat bank menempatkan dananya kepada debitur berisiko tinggi. Kesalahan analisis kredit bisa menimbulkan kerugian bagi bank maupun debitur yang berkualitas baik. Oleh karena itu dalam analisis kredit diperlukan kemampuan tinggi analisis atau *officer* dalam menentukan kelayakan pemberian kredit, diperlukan instrumen penilaian yang memadai dan dibutuhkan informasi yang *komprehensif*, lengkap dan benar, tidak ada informasi yang disembunyikan. Dalam banyak kejadian, meskipun bank telah menyiapkan tenaga/*officer* ahli dan instrumen penilaian yang obyektif dan terukur, tetap saja terjadi kemungkinan informasi yang disembunyikan oleh pihak atau calon debitur. Jika ini terjadi maka apapun hebatnya tenaga analisis dan instrumen yang digunakan, tidak akan memberikan keputusan kredit yang berkualitas. Oleh karenanya para *officer* atau analisis kredit, komite perkreditan atau para pengambil

keputusan pemberian kredit perlu memahami informasi asimetris yang kemungkinan terjadi di pihak calon debitur.

Perlu diketahui bahwa informasi asimetris bisa menimbulkan konflik keagenan antara debitur dengan pihak prinsipal atau kreditur. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa kreditur menyerahkan pengelolaan dana kepada debitur untuk dikelola debitur dan debitur harus mengamankan kepentingan kreditur. Kreditur (Bank) berkepentingan untuk mengendalikan debitur agar menggunakan dana tersebut secara hati-hati dan mampu meningkatkan kemakmuran bersama. Hal ini akan berjalan sebagaimana mestinya ketika mereka memiliki kepentingan yang sama. Debitur sebagai pihak yang melaksanakan amanah pihak bank memenuhi kepentingan bank atau kreditur. Persoalannya tidak selalu kepentingan dan tujuan kreditur selaras dengan kepentingan dan tujuan debitur. Para debitur bisa melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri atas beban kreditur. Debitur bisa mengambil keputusan yang berisiko tinggi karena penanggung risiko adalah kreditur. Debitur bisa melakukan *moral hazard* terhadap kreditur atau terhadap lembaga penjamin kredit. Debitur melakukan bisnis yang berisiko tinggi, namun bank tidak mendapatkan informasi bisnis debitur secara utuh. Bila debitur bankrut, maka bank yang menanggungnya. Dalam konteks ini maka kreditur menghadapi konflik keagenan dengan debitur, pihak debitur berupaya melakukan transfer kekayaan dari pihak bank melalui pengambilan risiko bisnis yang tinggi. Risiko bisnis yang tinggi selaras dengan return yang tinggi.

Hubungan kreditur dengan debitur dapat dijelaskan dalam perspektif keagenan. Dalam teori keagenan ditekankan bahwa konflik keagenan karena adanya informasi yang disembunyikan. Caprio dan Levine (2007) menegaskan bahwa bisnis perbankan (terutama perkreditan) adalah sektor usaha yang tidak transparan, dan ini berpotensi menimbulkan masalah keagenan. Dalam istilah perbankan sering disebut terjadi informasi asimetris, yang ini terjadi karena agen memiliki informasi yang lebih baik, lengkap dan komprehensif tentang bisnisnya dari pada kreditur (Diamond, 1984). Informasi asimetris yang tinggi akan menyesatkan bank

dalam pengambilan keputusan kredit dan bahkan menyulitkan kreditur dalam melakukan pengawasan, sebaliknya semakin rendah informasi asimetris maka bank semakin berkualitas dalam pengambilan keputusan kredit dan semakin mudah bagi bank dalam melakukan pengawasan. Dalam kondisi informasi asimetris relatif tinggi, kreditur tidak dapat secara cukup *me-monitor* tindakan-tindakan agen (debitur). Kreditur sangat sulit mengetahui kegiatan yang dilakukan debitur secara keseluruhan. Jika tindakan agen tidak dapat diamati dengan baik, maka kreditur atau bank tak dapat mendesain kontrak yang mendasarkan tindakan itu secara *fair*. Menurut Hahm dan Miskhin (2000) bahwa fenomena informasi asimetris yang tinggi di Indonesia bisa karena lemahnya regulasi sistem keuangan, lemahnya *loan officer* dan *risk assessment* oleh pihak bank. Sedangkan menurut Marciano (2008) bahwa ketiadaan lembaga *rating* independen atau belum bekerjanya lembaga *rating* independen di Indonesia untuk melakukan pemeringkatan terhadap kredit atau pinjaman yang diberikan.

Konsekuensi informasi asimetris selain mengganggu kualitas kontrak dan monitoring juga bisa menimbulkan *adverse selection* (Saunders and Cornett, 2006). Bank dapat melakukan kesalahan pengambilan keputusan kredit karena bank kesulitan membedakan antara calon debitur yang berkualitas baik dengan debitur (calon debitur) berkualitas buruk. Kesalahan bank itu misalnya dalam hal menetapkan tingkat suku bunga kredit. Akibat informasi asimetris yang tinggi pada debitur berkualitas buruk, maka bank tidak mengetahui seluruh informasi tentang debitur dan debitur lebih banyak mengetahui tentang bisnisnya. Pada posisi ini, kreditur menghadapi risiko kredit yang tinggi. Konsekuensinya bank akan menutup premi risiko tersebut dengan menetapkan tingkat bunga yang tinggi. Bila kemudian tingkat bunga yang ditetapkan berdasarkan informasi asimetris yang tinggi diberlakukan terhadap semua debitur pada bunga yang sama, maka dapat dipastikan bahwa debitur yang buruk menjadi menerima beban bunga yang relatif lebih murah daripada debitur yang berkualitas baik. Debitur berkualitas buruk dapat menggunakan dana perbankan untuk memperoleh return yang sangat tinggi melalui bisnis yang

spekulatif. Bisnis yang spekulatif atau memiliki return tinggi akan berhubungan positif dengan risiko yang tinggi, namun demikian debitur tersebut tetap menanggung bunga bank yang sama dengan debitur yang berkualitas baik, yang tidak spekulatif atau hati-hati dan bertindak sehat atau secara wajar. Konsekuensinya debitur buruk menjadi menanggung bunga yang relatif lebih murah, sedangkan debitur berkualitas baik menanggung bunga kredit relatif lebih mahal. Debitur berkualitas baik dirugikan dengan penetapan bunga tinggi yang diperlakukan sesuai debitur berkualitas buruk. Konsekuensinya debitur berkualitas baik akan menarik diri dari kesediaan menjadi debitur dan lebih memilih sumber dana internal atau sumber lainnya, dan pada gilirannya dana perbankan akan tersalurkan pada debitur-debitur berkualitas buruk. Disinilah terjadi *adverse selection*. Informasi asimetris telah memberikan kontribusi bagi kesalahan memilih penempatan dana dan bank menanggung risiko kredit.

Penetapan harga kredit atau tingkat bunga kredit yang relatif tinggi karena masalah informasi asimetris juga akan mendorong terjadinya transfer kekayaan dari bank ke debitur kualitas buruk. Tingkat bunga tinggi identik dengan biaya hutang yang tinggi bagi debitur. Tingginya biaya hutang tersebut dapat memicu manajer pihak debitur untuk melakukan bisnis yang memberikan *return* lebih tinggi. Bisnis yang memiliki *return* tinggi sering identik dengan bisnis berisiko tinggi. Jika ini terjadi, sebenarnya perusahaan debitur telah menganggap biaya hutang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan return dan risiko yang dihadapinya. Pada posisi seperti ini, kreditor sangat dirugikan sebab risiko yang tinggi pada akhirnya akan menjadi beban bank. Pergeseran risiko telah terjadi dari debitur ke bank, dan ini adalah praktik transfer kekayaan (*transfer of wealth*) oleh pihak debitur dari bank. Kalau bisnis yang berisiko tinggi itu berhasil maka menjadi keuntungan debitur, namun bila risiko yang tinggi itu benar-benar terjadi maka bank yang akan menanggungnya.

Bank asing sering dipandang sebagai bank yang jauh posisi geografisnya berpotensi menghadapi asimetri informasi tinggi, bank asing kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi debitur

lokal, sehingga tidak mudah mendapatkan informasi yang utuh dan berkualitas. Konsekuensi ini adalah bank asing menjadi lebih tinggi dalam menetapkan tingkat bunga kredit daripada bank domestik. Namun bila bank asing mampu mengurangi informasi asimetris dengan menggunakan teknologi informasi yang modern, beroperasi dengan biaya yang lebih efisien, memiliki sistem pengawasan yang lebih baik, maka bank asing dapat menetapkan bunga kredit lebih murah daripada bank domestik (Mian, 2003). Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, sebab bank domestik pun menghadapi informasi asimetris yang tinggi karena memang bisnis perkreditan adalah bisnis yang tidak transparan, belum adanya lembaga rating yang bekerja untuk debitur secara optimal, lemahnya *officer* dan teknologi juga menjadi kendala dalam memperoleh informasi yang komprehensif dan utuh. Oleh karena itu, baik bank asing maupun bank domestik sama-sama menghadapi informasi asimetris, namun penyebabnya yang berbeda (Taswan, 2010).

Tingkat Informasi asimetris dalam perkreditan bisa diturunkan melalui pemberian kredit terhadap kelompok usahanya atau ketika ada kesamaan pemegang saham antara pemegang saham bank dengan pemegang saham calon debitur. Kesamaan pemegang saham di bank dengan debitur akan berakibat pemegang saham dengan menggunakan *power*-nya untuk menekan manajer bank agar memberikan kredit dengan bunga murah pada perusahaannya. Harga kredit yang rendah juga karena kepemilikan saham yang sama antara bank dan debitur memang bisa menguntungkan bank berupa informasi asimetris yang rendah. Ini terjadi karena bank bisa memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi perusahaan debitur pada kelompok usahanya (ada kesamaan pemegang saham). Informasi asimetris yang rendah akan berakibat pada tingkat bunga kredit yang rendah. Dengan logika ini, maka di Indonesia banyak bank yang dimiliki oleh group usaha tertentu. Namun demikian, ada kelemahan fatal bila kredit diberikan kepada kelompok usahanya terutama bisa menimbulkan konsentrasi penempatan kredit yang tinggi, bahkan bisa menimbulkan kartel kredit dan posisi dominan yang bertentangan dengan UU anti monopoli. Lebih jauh, perusahaan kelompoknya meminjam

dana ke bank dari kelompok usahanya dengan biaya yang lebih murah, namun kurang memperhatikan tingkat risiko yang layak. Dengan demikian sebenarnya adanya potensi moral hazard pemegang saham di debitur kelompoknya terhadap depositan. Kondisi ini sangat merugikan depositan karena sebagian besar dana di bank didominasi oleh dana depositan, bukan oleh pemegang saham, akibatnya bila usaha debitur itu bangkrut maka depositan yang paling besar menanggungnya. Oleh karena itu perhatian terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit menjadi mutlak diperlukan dalam penempatan kredit untuk menghindari masalah ini. Bank wajib mematuhi regulasi Legal Lending Limit (LLL) dan mengendalikan portofolio kredit. Pemberian kredit pada pihak terkait yang terlalu besar mengindikasikan bahwa kredit tersebut terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Semakin tinggi konsentrasi kredit maka semakin tinggi risiko kredit. Sebaliknya semakin rendah konsentrasi kredit maka semakin rendah risiko kredit. Regulasi batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *legal lending limit* akan mengarahkan bank untuk menempatkan kredit tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Diversifikasi terjadi dan risiko bisa ditekan.

Dengan adanya informasi asimetris di pihak debitur, maka analisis kredit atau pengambil keputusan kredit perlu memahami cara dalam mengurangi kerugian akibat informasi asimetris tersebut antara lain melalui *cross monitoring* maupun *loan covenant*. *Cross monitoring* dilakukan bila debitur memiliki sekuritas yang telah diterbitkan di pasar modal. Bank bisa menggunakan informasi dari analisis pasar modal, lembaga pemeringkat dan Bursa. Namun demikian pengawasan ini sering dianggap kurang efektif karena pada hakekatnya bank lebih mampu memiliki informasi yang lebih valid daripada informasi atau data sekunder. Bank juga bisa menerapkan *loan covenant*. Pada *loan covenant*, kreditur akan melihat karakteristik debitur lebih lanjut. Bila debitur dipandang berkualitas buruk atau mempunyai informasi asimetris tinggi maka bank dapat menetapkan kontrak kredit jangka pendek. Menurut teori informasi asimetris bahwa semakin panjang jangka waktu kredit mencerminkan semakin baik kualitas informasi (semakin rendah asimetri informasi, semakin

rendah risikonya) sehingga semakin rendah tingkat bunga kredit yang ditetapkan. Sebaliknya, bila semakin pendek jangka waktunya maka mencerminkan semakin tinggi asimetri informasinya sehingga tingkat bunga menjadi lebih mahal. Teori ini memang berlawanan dengan teori suku bunga kredit yang menyebutkan bahwa semakin lama jangka waktu kredit maka semakin tinggi risikonya sehingga semakin mahal tingkat bunga kreditnya. Dalam menggunakan *loan covenant*, selain menggunakan jangka waktu kredit, adalah menggunakan *term loan* untuk debitur-debitur yang memiliki informasi asimetris tinggi. *Term loan* adalah jenis kredit yang jumlah angsuran bunga dan pokok kredit serta jadwal pembayarannya ditetapkan secara pasti. Cara ini umum digunakan oleh lembaga perbankan.

Cara lain untuk menurunkan risiko akibat informasi asimetris dan kemungkinan moral hazard adalah membatasi kemungkinan kerugian akibat dari kredit yang tingkat probabilitas gagalannya tinggi, dengan mensyaratkan agunan kredit (*credit collateral*). Agunan kredit secara teoritis bisa mencerminkan debitur dengan kualitas baik (berisiko rendah). Menurut Besanko dan Thakor (1987) dengan menggunakan teori sinyal menjelaskan bahwa debitur dengan kualitas baik akan memberikan agunan kredit untuk membedakan mereka dengan debitur kualitas buruk, oleh karenanya debitur kualitas baik akan berani menyerahkan *asset*-nya untuk agunan kredit. Konsekuensinya adalah harga atau tingkat bunga kredit untuk debitur kualitas baik menjadi lebih rendah dibandingkan dengan harga atau tingkat bunga kredit bagi debitur berkualitas rendah.

Teori penjas yang lain mengenai agunan dikemukakan oleh Berger dan Udell (1990), yang menjelaskan bahwa keberadaan agunan kredit itu mencerminkan debitur dengan kualitas buruk (berisiko tinggi). Argumennya bahwa bank atau kreditur akan meminta agunan yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank karena kredit tersebut memiliki probabilitas gagal relatif tinggi. Dengan demikian semakin tinggi agunan bisa identik dengan semakin tinggi harga atau bunga kredit. Praktik perkreditan di Indonesia lebih mengarah pada teori yang kedua.

Bank mensyaratkan agunan semakin tinggi untuk kredit dengan risiko yang semakin tinggi.

Untuk mencegah konsekuensi dari asimetri Informasi, bank juga bisa melakukan *Credit Rationing*. Dalam hal ini, bank dapat membatasi kerugian dengan cara membatasi volume kredit atau besarnya kredit (loan size). Semakin besar debitur diberikan kredit menunjukkan debitur itu semakin berkualitas baik. Sebaliknya semakin kecil *loan size* menunjukkan debitur tersebut semakin berkualitas buruk. Konsekuensinya adalah debitur besar sering mendapat harga kredit atau tingkat bunga kredit yang lebih murah dibandingkan dengan debitur kecil (Datta, Iskandar Datta, Patel, 1999). Praktik ini sudah lazim dilakukan di Indonesia untuk membatasi kerugian bank akibat debitur melakukan gagal bayar.

Analisis kredit juga perlu memperhatikan kemampuan *monitoring* dan regulasi dalam pemberian kredit. Semakin baik kemampuan bank melakukan monitoring kredit maka semakin rendah tingkat konflik dengan debitur karena kredit akan berkualitas baik. Konsekuensinya bank akan memiliki reputasi baik dan risiko bisa ditekan. Bila kemampuan *monitoring* semakin tinggi, berarti mampu menekan informasi asimetris dan pada gilirannya bisa memberikan harga kredit yang lebih rendah pada debitur kualitas baik. Namun bank juga harus memperhatikan regulasi perbankan. Regulasi permodalan yang mensyaratkan modal minimum semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya harga kredit (bunga kredit). Bank melakukan kompensasi atas pemenuhan persyaratan modal dengan cara membebaskan kepada debitur. Selain regulasi permodalan juga regulasi cadangan wajib Bank Indonesia. Semakin tinggi cadangan wajib berarti semakin tinggi sumber dana yang tidak ditempatkan pada aktiva produktif (termasuk kredit). Peningkatan *unloanable fund* ini pada gilirannya meningkatkan *cost of fund*. Peningkatan *cost of fund* akan meningkatkan harga atau tingkat bunga kredit.

Untuk menurunkan risiko kredit karena adanya informasi asimetris, kreditur juga bisa menerapkan sistem perkreditan yang tepat. Sistem perkreditan akan menentukan pola pembayaran/pelunasan kredit, oleh karena itu penempatan kredit harus memperhatikan sistem

perkreditan. Dalam sistem perkreditan menjadi salah satu pertimbangan penting terutama ketika menyangkut sumber pembayaran kredit itu sendiri. Kepastian sumber pelunasan kredit sangat mempengaruhi keputusan kelayakan kredit. Secara umum sistem perkreditan ada 3 (tiga) macam, *pertama* adalah *self liquidating system*. *Self Liquidating System* adalah sistem pemberian kredit yang didasarkan pada kepastian sumber pelunasan kredit. Pada sistem ini sumber referensinya adalah sumber penghasilan, jumlah penghasilan debitur dan jangka waktu pelunasan yang telah diketahui terlebih dahulu oleh bank, dengan demikian ada kepastian. Dalam sistem ini, bank akan menilai sumber penghasilan, jumlah penghasilan dan jangka waktu sebagai bagian dari penilaian prospek kemampuan debitur dimasa depan. Informasi ini relatif mudah didapat, sehingga asimetri informasi bisa ditekan. Contoh: Jumlah kredit Rp 100.000.000, nilai angsuran Rp 4.130.000 per bulan. Jangka waktu 3 tahun. Gaji pegawai per bulan Rp 10.000.000, penghasilan lainnya Rp 2.000.000 maka bisa diterjemahkan: Perhatikan referensinya, bahwa nilai kenaikan gaji karyawan terkait prospek lembaga tempat bekerja, kepangkatan, jabatan karyawan dan usia pensiun. Item tersebut kaitkan dengan lama atau jangka waktu kredit, apakah selama kontrak kredit tersebut pihak debitur (karyawan masih bekerja, apakah ada kenaikan sumber pendapatan ke depan, dan pada usia berapa akan pensiun). Bank perlu memperhatikan usia pensiun, karena pensiun bisa diidentikkan dengan penurunan arus kas debitur. Dalam perkreditan, item-item tersebut dilihat sebagai bagian prospek arus kas debitur untuk pinjaman konsumtif. Sistem ini umumnya diterapkan untuk kredit konsumtif.

*Kedua* adalah *anticipated income system*. Pada sistem ini penempatan kredit mendasarkan pada proyeksi sumber penghasilan, jumlah penghasilan, jumlah pelunasan dan waktu pelunasan. Sistem ini biasanya terjadi pada kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai barang-barang modal (memberi manfaat lebih dari 1 tahun), misalnya dalam rangka pendirian badan usaha, ekspansi usaha, atau mungkin rehabilitasi pabrik dll. Kredit Investasi ini mengandung risiko yang besar. Bank mengandalkan referensi berupa rencana yang bersifat proyektif sehingga masih terdapat

ketidakpastian dimasa mendatang. Secara ringkas di tabel 1.2.

Perhatikan referensinya, bahwa rencana proyek investasi, estimasi arus kas dan rencana jangka waktu proyek atau bisnis akan menentukan kemampuan debitur melakukan pembayaran angsuran kredit. Dalam sistem ini terdapat ketidakpastian yang sangat tinggi, karena seluruh arus kas bersifat prediktif. Ketepatan prediksi sangat tergantung dari ketepatan asumsinya. Bila asumsi-asumsi yang dirumuskan berubah dimasa depan, maka perubahan arus kas sangat mungkin terjadi dan mempengaruhi pembayaran pinjaman. Oleh karena itu item-item tersebut dalam keputusan pemberian kredit dan keputusan restrukturisasi kredit, dipertimbangkan faktor penting atau sebagai bagian prospek usaha debitur.

**Ketiga** adalah **sistem Kombinasi (mix)**. Sistem ini adalah sistem perkreditan untuk pembiayaan usaha atau investasi/konsumsi yang mengandung kedua kondisi diatas (*self liquidating & anticipated Income*). Penilaian prospek sumber pelunasan kredit bisa saja dilakukan selain dari informasi prospek bisnis pihak debitur kemungkinan masih baik, sumber pendapatan usahannya, juga dari pendapatan tetap non bisnis yang diterima pihak debitur. Seorang debitur bisa saja sebagai pelaku usaha sekaligus sebagai karyawan atau pekerja pada perusahaan lain. Contoh seorang guru selain mengajar di sekolah juga bisa melakukan usaha ayam potong, usaha konfeksi di rumah dll. Mereka selalin mendapatkan gaji setiap bulan juga masih memperoleh pendapatan dari bisnisnya. Untuk kepentingan kredit, sumber-sumber pendapatan untuk pelunasan kredit tersebut perlu digali dan menjadi pertimbangan penting keputusan kredit dan bahkan ketika mengatasi kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit.

Reduksi risiko kredit akibat informasi asimetris, juga bisa dilakukan melalui analisis kredit yang komprehensif, tajam dan obyektif. Kegagalan kredit bisa dimulai dari analisis kredit yang lemah. Oleh karena itu keputusan pemberian kredit harus dianalisis secara komprehensif, tajam dan obyektif. Komprehensif bisa dilihat dari aspek yang dipertimbangkan, semakin banyak aspek perkreditan yang dinilai maka semakin komprehensif. Tajam dalam arti penggunaan alat

analisis harus dapat mendeteksi titik kritis bisnis calon debitur, bisa memberikan informasi kualitas debitur dan prospek bisnis secara akurat. Sedangkan obyektif dapat dimaknai bahwa informasi yang digunakan seluruhnya harus berkualitas, siapapun yang melakukan analisis akan menghasilkan keputusan yang sama. Dalam hal menyangkut keobyektifan pemberian kredit bisa diperkuat melalui keputusan komite perkreditan yang beranggotakan orang-orang yang kompeten di bank tersebut. Dalam komite perkreditan terdapat anggota komite atau orang-orang atau subyek-subyek. Pendapat subyek-subyek tersebut kalau diintegrasikan atau disimpulkan akan memberikan keputusan yang obyektif.

Risiko kredit akibat informasi asimetris juga bisa direduksi melalui transfer risiko kredit dari pihak kreditur ke pihak penjamin atau lembaga asuransi kredit. Upaya bank melakukan transfer risiko melalui penjaminan kredit atau asuransi kredit dapat menggeser risiko kredit. Pada penjaminan kredit misalnya sebagian agunan yang tidak ter-cover oleh debitur dapat di-cover oleh lembaga penjamin kredit. Debitur yang tidak *bankable* menjadi *bankable*. Bahkan dengan adanya kerjasama dengan lembaga penjamin kredit, maka bank bisa melakukan monitoring bersama dengan pihak penjaminan kredit. Dengan demikian diharapkan monitoring kredit lebih efektif. Sedangkan untuk asuransi kredit akan memberikan ganti rugi atas kredit yang bermasalah (macet), sehingga bank dapat dikatakan melakukan transfer risiko ke lembaga asuransi kredit. Namun demikian, dalam skema penjaminan kredit perlu diperhatikan cover penjaminan. Semakin tinggi cover jaminan kredit akan semakin tinggi potensi debitur melakukan moral hazard atas beban lembaga penjamin kredit. Cover jaminan kredit sangat disarankan dibawah 70 persen dari plafoun kredit, dengan demikian debitur masih menghadapi risiko bila bangkrut. Harapannya debitur masih bertindak hati-hati meski hutangnya telah dijamin. Sedangkan dalam asuransi kredit, yang perlu diperhatikan adalah pertanggunganan risiko kegagalan bisnis. Debitur yang gagal bisnis tidak selayaknya seluruh hutangnya ditanggung oleh lembaga asuransi kredit. Disamping itu, perlu dipertimbangkan premi penjaminan kredit mestinya berdasarkan

tingkat risiko. Semakin tinggi risiko kredit maka semakin tinggi premi penjaminan kredit. Konsekuensinya debitur bertindak hati-hati.

Langkah represif bila risiko kredit telah terjadi adalah likuidasi atau restrukturisasi Kredit. Upaya-upaya yang dilakukan diatas lebih bersifat antisipatif untuk mencegah kerugian akibat kegagalan kredit, sedangkan upaya yang dilakukan setelah terjadi kredit bermasalah lebih bersifat tindakan penyelamatan dana perbankan. Bagaimana upaya bank dalam menyelamatkan kredit bila terjadi kredit bermasalah? Ada berbagai metoda atau teknik yang bisa dilakukan bank paska kredit bermasalah atau bahkan macet, antara lain melalui likuidasi atau restrukturisasi. Namun perlu diketahui bahwa tindakan nyata paska terjadi kredit bermasalah yang dipandang paling baik saat ini adalah restrukturisasi kredit, baik dalam arti untuk pihak bank maupun pihak debitur. Bank bisa menyelamatkan dananya karena kolektibilitas kredit yang bermasalah tersebut menjadi lebih baik, sedangkan usaha atau bisnis debitur masih tetap bisa berjalan. Restrukturisasi kredit sebenarnya merupakan upaya untuk mengembalikan posisi kredit pada sasaran yang tepat yaitu kembali pada posisi aman, terarah dan menghasilkan. Sedangkan tindakan likuidasi sering dipandang baik hanya untuk bank karena dengan tindakan likuidasi otomatis bisa menghentikan bisnis pihak debitur.

## SIMPULAN

Informasi asimetris sangat potensial terjadi pada bisnis perkreditan, sebab lemahnya loan officer, lemahnya asesmen risiko, belum adanya lembaga rating independen yang memeringkat hutang pihak debitur secara optimal, serta agenda tersembunyi pihak calon debitur. Asimetri informasi yang tinggi mengakibatkan konflik keagenan antara kreditur dengan debitur. Debitur adalah agen dari kreditur. Sebagai agen perlu menjalankan amanah pihak principal (kreditur) berdasarkan kontrak kredit yang disepakati antara kreditur dengan debitur. Namun bila kreditur menghadapi informasi asimetris yang tinggi, maka tidak bisa mendesain kontrak kredit secara fair. Konsekuensinya konflik keagenan antara kreditur dengan debitur bisa terjadi, ada *adverse selection*, harga kredit menjadi mahal, risiko kredit menjadi tinggi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut perlu dikelola misalnya melalui sistem

monitoring yang efektif, *loan covenant*, pengetatan regulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit), *Credit Rationing*, penjaminan dan asuransi kredit serta restrukturisasi kredit.

Penanganan akibat informasi asimetris lebih bersifat untuk mereduksi akibat, bukan untuk mencegah informasi asimetris agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Namun bila kegagalan kredit sudah terjadi, maka tawaran solusi adalah tindakan likuidasi atau restrukturisasi. Dalam perspektif bahwa debitur masih berprospek baik dan masih mau bekerjasama dengan kreditur, maka solusi restrukturisasi kredit menjadi pilihan yang menjanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berger, A., Udell, G., (1990). Collateral, loan quality and bankrisk. *Journal of Monetary Economics* 25,21-42.
- Besanko, D., and A. Thakor. (1987)a. "Collateral and Rationing: Sorting Equilibria in Monopolistic and Competitive Credit Markets." *International Economic Review* 28: 671-89.
- . (1987)b. "Competitive Equilibria in the Credit Market under Asymmetric Information." *Journal of Economic Theory* 42:167-82.
- Caprio, G., L. Laeven, and R. Levine. (2007). "Ownership and Bank Valuation." *Journal of Financial Intermediation* 16, 584-617.
- Diamond, D.W., (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *The Review of Economic Studies* 51, 393-414.
- Diamond, Douglas W. and Phillip H. Dybvig, (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity, *Journal of Political Economy*, 91, pp. 401-419.
- Hahn, Joon-Ho and Frederick S. Mishkin, (2000), *The Korean Financial Crisis : an Asymmetric Information Perspective*,



- Emerging Market Review*, Elsevier Science, Columbia
- Datta, Sudip, Mai Iskandar-Datta and Ajay patel, (1999), Bank monitoring and the pricing of corporate public debt, *Journal of Financial Economics*, Winston-Salem, NC 27109, USA
- Saunders, Anthony dan Marcia Millon Cornett, (2006), *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*, McGraw Hill, Toronto, International Edition.
- Marciano, Dedy, (2008), *Pengaruh Asimetri Informasi, Moral Hazard dan Struktur Pendanaan Dalam Penentuan Harga Pinjaman Korporasi Dalam Kurs US Dolar: Studi Empiris di Indo. 1990 -1997*, Disertasi S3 UGM, Tidak dipublikasikan.
- Mian, Atif, (2003), *Foreign, Private Domestic, and Government Banks: New Evidence from Emerging Market*, Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago
- Taswan, (2010), *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

## LAMPIRAN

**Tabel 1..** Sumber Pelunasan Kredit dan Referensinya-*Self Liquidyting System*

Keterangan	Referensi
Sumber Penghasilan	Gaji Karyawan , sesuai referensi Rp 10.000.000
Jumlah Penghasilan	Nilai Penghasilan Karyawan, Rp 12.000.000
Jumlah Pelunasan	Sesuai Skala angsuran, Rp 4.130.000 per bulan
Waktu Pelunasan	Sesuai akad kredit, selama 36 bulan

**Tabel 2.** Sumber pelunasan dan Referensinya-*Anticipated Income System*

Keterangan	Referensi
Sumber Penghasilan	Rencana Proyek/Investasi
Jumlah Penghasilan	Estimasi Arus Kas Masuk
Jumlah Pelunasan	Rencana/Proyeksi Arus Kas
Waktu Pelunasan	Rencana/Estimasi Jangka Waktu